

EVALUASI PROGRAM AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM DALAM MENURUNKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SUMEDANG

Lalas Sulastr¹, Ediyanto², Dedeh Rusmayanti³, Yayat Suryana⁴, Muhamad Nizar Fardiansyah⁵,
Tatang Setiadi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Maret 25, 2024

Revised April 20, 2024

Accepted Mei 30, 2024

Keywords:

Public Policy

Evaluation of Public Policy

Traffic Control System

ABSTRACT

This study aims to evaluate the ATCS Program in reducing traffic violations in Sumedang Regency. The method used in this research is qualitative. The target of the study is 63 individuals, with five informants consisting of the Secretary of the Department of Transportation, the Head of the Safety and Supervision Division, the Head of the Safety Section, an ATCS Operator, and an ATCS Technician. Data collection techniques include data reduction, data presentation, conclusion drawing/verification, and triangulation. The results of the study regarding the evaluation of the ATCS program in reducing traffic violations in Sumedang Regency from the implementation perspective can be considered quite good, but there is still a lack of infrastructure, which has led to no significant decrease in traffic violations in Sumedang Regency. From the impact perspective, it is also considered good, with many people becoming more orderly in driving, especially at intersections with ATCS cameras. The recommendations from this study include improving infrastructure, imposing penalties on traffic violators, and increasing human resources to help the ATCS program reduce traffic violations in Sumedang Regency.



Copyright © 2023 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Lalas Sulastr,
Program Studi Administrasi Publik,
Universitas Sebelas April,
Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang.
Email: lalassulastr@unsap.a.c.id

1. INTRODUCTION

Lalu lintas kini merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Peranan lalu lintas yang signifikan tersebut memiliki hal positif bagi masyarakat, tetapi juga ada beberapa hal negatif yang dapat terjadi dalam sirkulasi harian penggunaan jalur lalu lintas. Ketika luas jalur lalu lintas yang digunakan tidak sebanding dengan volume kendaraan yang ada, maka akan terjadi kemacetan lalu lintas. Selain itu, masyarakat yang kurang memiliki jiwa disiplin yang baik kerap kali melanggar aturan lalu lintas.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kota yang terletak di titik yang sangat strategis. Berada di tengah-tengah jalur menuju ibukota Provinsi Jawa Barat yaitu kota Bandung. Berdasarkan data Statistik Kabupaten Sumedang, tahun 2023 penduduk Kabupaten Sumedang sebesar 1.204.083 jiwa. Dengan banyaknya Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang tersebut, membuat volume kendaraan yang ada menjadi banyak.

Sebagai salah satu daerah strategis, Kabupaten Sumedang memiliki jalan yang banyak dilintasi oleh kendaraan dari daerah Kota Cirebon menuju daerah ibu kota Jawa Barat yang salah satunya adalah Jalan Bunderan Binokasih. Jalan ini relatif sangat padat dan dilintasi oleh berbagai macam kendaraan seperti Angkutan Penumpang Antara Bandung menuju Cirebon atau sebaliknya. Selain itu, jalan lain di Kabupaten Sumedang yang juga relatif padat dan terkadang mengalami kemacetan adalah Jalan Sekitar Alun-alun Sumedang yang terletak di pusat kota dan berada dekat dengan pusat Pendidikan dan Perdagangan. Jalan Sekitar Alun-alun sering dilintasi oleh kendaraan Angkutan Kota (Angkot) menuju pusat pendidikan dan pusat perdagangan. Lalu lintas yang padat dan pemaknaan jalan dengan waktu yang bersamaan di jalan Bunderan binokasih dan Jalan sekitar alun alun menyebabkan kemacetan lalu lintas sering terjadi di kedua jalan ini.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan.

Untuk wewenang, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, izin Operasi Angkutan Sewa, izin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.

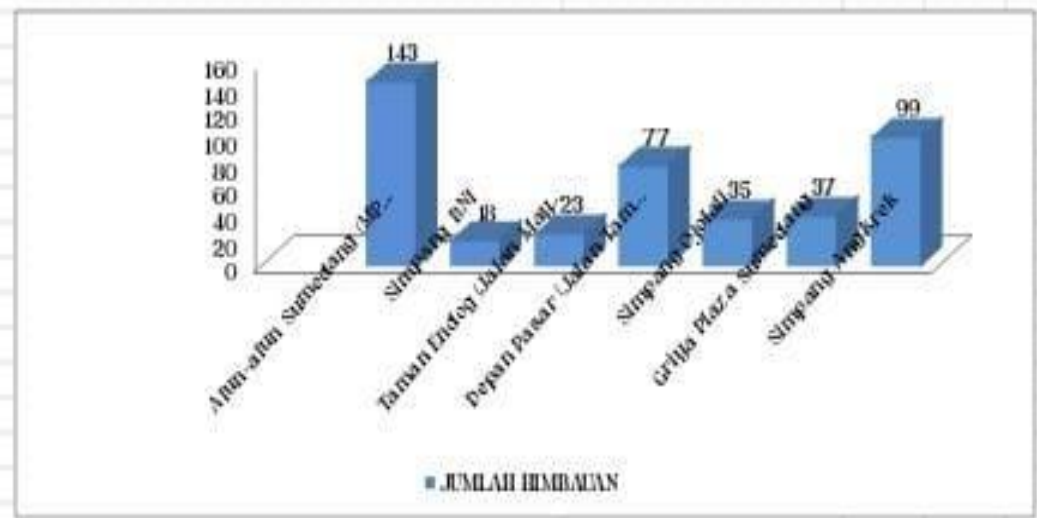
Untuk mengatur lalu lintas Dishub Kabupaten Sumedang melaksanakan program ATCS. ATCS adalah sebuah sistem pengatur lalu lintas bersinyal terkoordinasi yang diatur mencakup wilayah secara terpusat. Dengan ATCS maka dapat dilakukan upaya manajemen rekayasa lalu lintas yang mengkoordinasikan semua titik-titik persimpangan bersinyal melalui pusat kontrol ATCS, sehingga diperoleh suatu kondisi pergerakan lalu lintas secara efisien. Teknologi ATCS sendiri telah banyak diterapkan di berbagai kota besar di negara maju.

Dengan ATCS, penataan siklus lampu lalu lintas dilakukan berdasar input data lalu lintas yang diperoleh secara real time melalui kamera CCTV pemantau lalu lintas pada titik-titik persimpangan. Penentuan waktu siklus lampu persimpangan dapat diubah berkali-kali dalam satu hari sesuai kebutuhan lalu lintas paling efisien yang mencakup keseluruhan wilayah tersebut. Penataan ritme lalu lintas akan lebih baik apabila pemerintah kota menerapkan teknologi ATCS pada semua persimpangan lalu lintas yang ada di kota tersebut.

Pelaksanaan program ATCS ini mulai diberlakukan di Kabupaten Sumedang tahun 2021. Untuk saat ini titik-titik persimpangan yang dipasang lampu merah ATCS di antaranya, Jalan Alamsari, Jalan Prabu Geusan Ulun, Jalan Angkreng dan Jalan Bunderan Binokasih. Untuk saat ini, jumlah kamera yang terpasang di kabupaten sumedang sebanyak 64 titik, 23 Kamera PTZ dan 41 kamera Fix. Pan Tilt Zoom Camera (PTZ) adalah kamera yang bisa bergerak ke kanan kiri, naik turun dan melakukan fungsi zoom. Sedangkan Fix Kamera menunjukkan bahwa kamera jenis ini harus Zooming, fokus, dan sebagainya saat instalasi karena kamera jenis ini tidak dapat diatur melalui sebuah alat remote control khusus seperti PTZ Camera. Untuk mengubah posisi CCTV (seperti menaikkan atau menurunkan, geser kiri atau kanan) harus dilakukan manual.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang bertindak sebagai pelaksana kebijakan, maka dibentuk tim pelaksana program ATCS yang bertugas mengelola pelaksanaan program ATCS. Dalam pelaksanaan ATCS di Kabupaten Sumedang harapan yang ingin dicapai salah satunya adalah mengurangi pelanggaran lalu lintas dan menangani kemacetan. Namun tingkat masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas di

persimpangan masih terbilang cukup tinggi. Adapun jumlah himbauan selama bulan Juli 2023 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1: Jumlah Himbauan Selama Bulan Juli 2023

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, 2023

Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Sumedang, mengatakan bahwa berbagai pelanggaran lalu lintas kerap kali banyak ditemui pada setiap ruas jalan persimpangan Kabupaten Sumedang, salah satunya pada persimpangan Jalan Angkrek yang merupakan tempat yang paling banyak ditemui pelanggaran lalu lintas. Yang diantaranya pelanggaran tidak menggunakan helm yang dilakukan oleh para pengendara.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program ATCS ini masih kurang efektif karena pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumedang masih mengalami kenaikan dari sebelum menggunakan ATCS sampai sesudah menggunakan ATCS. Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya evaluasi terhadap program tersebut amatlah penting dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dapat mencapai tujuannya.

Merujuk pada permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Evaluasi Program Area Traffic Control System Dalam Menurunkan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Sumedang". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berarti dalam upaya Menurunkan pelanggaran Lalu lintas di Kabupaten Sumedang, karena dengan menurunnya pelanggaran lalu lintas akan menurun juga tingkat kemacetan di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi focus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Program Area Traffic Control System (ATCS) dalam Menurunkan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana dampak Program Area Traffic Control System (ATCS) dalam Menurunkan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sumedang?

2. METHOD

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut juga dengan metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dalam penelitian ini yang diamati yaitu Evaluasi Program Area Traffic Control System (ATCS) Dalam Menurunkan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sumedang.

Sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh unsur terkait dalam Program Sistem Pengaduan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (SIPPUJAAN) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Adapun sasaran penelitian dalam penelitian ini sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Penelitian

No.	Unsur	Jumlah Orang
1	Sekretariat	12
2	Bidang Angkutan	8
3	Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	13
4	Bidang Teknik dan Sarana Prasarana Lalu Lintas	5
5	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	9
6	UPT Terminal Wado	6
7	UPT Penerangan Jalan Umum (PJU)	4
8	Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas	6
Jumlah		63

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, 2023

Informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan paham akan Evaluasi Program Area Traffic Control System (ATCS) dalam Menurunkan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Sumedang yang ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Keselamatan dan Pengawasan, Kepala Seksi Keselamatan, Operator ATCS dan Teknisi ATCS.

Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan dan triangulasi. Sementara teknik analisis yang digunakan, yaitu *Data Collection*, *Data Reduction*, *Data Display* dan *Conclusion Drawing*.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Secara umum evaluasi kebijakan menurut Anderson dalam Winarno (2008: 166), dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Sedangkan menurut, Dari pengertian di atas menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Publik dapat dipengaruhi oleh Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan, Peran Aktor Kebijakan dan Sarana dan Prasarana.

Pertama, implementasi menurut Gordon dalam Pasolong (2017) "Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program". Implementasi sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Dimana didalam implementasi kebijakam aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama dan simultan.

Hasil wawancara terkait implementasi program area traffic control system dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumedang menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Wawancara Implementasi

Fokus Masalah	Indikator	Kesimpulan
Implementasi Kebijakan	Mekanisme	Membuat Himbauan Kepada Masyarakat berkaitan dengan ketertiban dan pencegahan pelanggaran dan kita coba buat itu berupa himbauan yang memang berupa materi himbauan dan juga dilakukan langsung kepada pengguna jalan yang melanggar Lalu Lintas jadi ada yang berupa rekaman yang kita putar secara rutin dan juga berupa himbauan atau teguran kepada pengguna jalan yang melanggar
	Peran Aktor	kebijakan Dishub bertindak sebagai pelaksana, maka dibentuk tim pelaksana program ATCS yang bertugas mengelola pelaksanaan program ATCS. Dalam pelaksanaan ATCS di kota Sumedang harapan yang ingin dicapai salah satunya adalah mengurangi pelanggaran lalu lintas dan menangani kemacetan.
	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana yang saat ini masih belum mampu mengatasi pelanggaran lalu lintas karena masih banyak pelanggar yang melakukannya.

Sumber: Hasil Wawancara, 2023

Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas, Implementasi dari Program ATCS dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di kabupaten sumedang, dari perspektif Mekanisme secara keseluruhan sudah dapat dikatakan baik, mekanisme yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam implemtasi program ATCS dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas di kabupaten Sumedang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari Kebijakan yang sedang dilakukan. Dari prespektif Peran Aktor juga dapat dikatakan cukup baik, peran actor dalam program ATCS dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas di kabupaten Sumedang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari Kebijakan yang sedang dilakukan. Dari prespektif Sarana dan prasarana juga dapat dikatakan cukup baik meskipun masih banyak kekurangannya.

Kedua, Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat: Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan, Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang, Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik, Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Hasil wawancara terkait dampak program area traffic control system dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumedang menunjukan hasil sebagai berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Wawancara Dampak

Fokus Masalah	Indikator	Kesimpulan
Dampak Kebijakan	Tujuan dan sasaran	Tujuannya yaitu untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dan juga sasarannya untuk semua pengguna jalan lalu lintas.
	Dampak Pelaksanaan	Dampaknya Masyarakat menjadi memahami dan mengetahui tentang pentingnya Keselamatan dalam berkendara.
	Output	Hasil dari program ini yaitu pengendara menjadi lebih tertib walaupun angka pelanggaran lalu lintas tidak mengalami penurunan
	Benefit	Lalu Lintas yang berada di jalur persimpangan menjadi lancar dan tidak terjadi kemacetan.

Sumber: Hasil Wawancara, 2023

Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas, Dampak dari Program ATCS dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di kabupaten sumedang, dari perspektif Tujuan dan sasaran secara keseluruhan sudah dapat dikatakan baik. Dari perspektif output dan outcome dapat dikatakan Program ATCS ini sudah cukup baik. Di dukung denga teori Menurut Budi Winarno (2011) implementasi dalam sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Dari perspektif Benefit dapat dikatakan Program ATCS ini sudah cukup baik. Didukung dengan teori Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil jika kebijakan tersebut memiliki keuntungan (*benefit*).

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari perspektif Implementasi, Mekanisme yang digunakan oleh dinas perhubungan dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di kabupaten Sumedang Sudah baik yaitu dengan cara memberi himbauan kepada masyarakat pengguna jalan. Peran Dinas Perhubungan juga dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi dalam sarana prasarana program ini memiliki sarana dan prasarana yang kurang dimana masih banyak persimpangan yang ada di kabupaten Sumedang masih belum terpasang kamera yang mengakibatkan angka pelanggaran lalu lintas belum mengalami pengurangan.
2. Dari Perspektif Dampak, Sasaran dan tujuan dari program ATCS ini sudah sesuai yang direncanakan, yaitu diajukan untuk masyarakat pengguna jalan. Dampak dari program ATCS ini dapat mengurangi volume kemacetan yang terjadi di kota sumedang dan juga dapat memberikan informasi situasi jalan persimpangan yang ada di indonesia.

REFERENCES

- Silalahi, Ulbert. 2020. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Wahab, Abdul. 2017. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Syarifudin, Arif. 2018. *Implementasi Program di Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian Ddan Statistik Kabupaten Sumedang: Skripsi Penelitian Kualitatif: STIA Sebelas April Sumedang*.
- Fatah Khoerudin, Abdul, dkk. (2023). *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Stress Kerja Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang dalam Mengawal Tahapan Pemilu: PPA Penelitian Kualitatif: Universitas Sebelas April Sumedang*.